

Judul : Legislator harap KBM jangan sampai terhenti
Tanggal : Rabu, 26 Agustus 2026
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 9

Pulihkan Pendidikan NTT

Legislator Harap KBM Jangan Sampai Terhenti

GEMPA bumi yang mengguncang Nusa Tenggara Timur (NTT) pada 15 Agustus 2026 tidak hanya merusak rumah dan fasilitas umum, tetapi juga menghantam infrastruktur pendidikan. Komisi X DPR mendesak Pemerintah segera mendata seluruh guru, tenaga kependidikan, dan pelajar terdampak agar tidak ada yang terabaikan dalam proses penanganan bencana.

Anggota Komisi X DPR Rycko Menoza SZP mendorong Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) segera menginventarisir dampak kerusakan sekolah. "Data yang akurat sangat penting untuk memastikan bantuan dan pemulihan pendidikan berjalan tepat sasaran," kata Rycko dalam keterangan persnya, Senin (24/8/2026).

Dia mengatakan, tanpa data yang jelas, penyaluran bantuan pendidikan, dukungan psikososial hingga pemulihan sarana belajar berpotensi terhambat. "Anak-anak kita tidak boleh kehilangan hak belajarnya terlalu lama. Guru dan pendidik juga harus dipastikan keamanannya. Negara harus hadir di sini," tegasnya.

Rycko juga meminta pemerintah memastikan hak belajar siswa tetap berjalan meski gempa susulan masih terjadi. Siswa yang sekolahnya terdampak dapat ditampung di lokasi yang aman atau menggunakan fasilitas belajar sementara seperti tenda. "Memastikan keamanan juga hak belajar siswa tidak terhenti selama kondisi gempa susulan dan menampung di sekolah aman atau menggunakan tenda," ujarnya.

Tak hanya pendataan, Rycko mendorong pemerintah segera menyiapkan skema khusus untuk memulihkan aktivitas pendidikan di wilayah terdampak. Skema tersebut meliputi penyediaan sekolah darurat, bantuan perlengkapan belajar hingga trauma *healing* bagi peserta didik. "Kita butuh gerak cepat. Inventarisasi ini jadi dasar untuk semua kebijakan lanjutan. Jangan sampai ada satu pun anak atau guru yang terlewat dari perhatian negara," tegasnya.

Rycko mengapresiasi kebijakan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) Abdul Mu'ti yang memastikan satuan pendidikan terdampak gempa di Flores, NTT, mendapat prioritas dalam program Revitalisasi Satuan Pendidikan tahun



Rycko Menoza

ini. Kebijakan tersebut menunjukkan pemerintah tidak hanya fokus pada penanganan darurat, tetapi juga mulai menyiapkan pemulihan sarana pendidikan secara berkelanjutan.

"Langkah ini penting agar pemulihan sekolah tidak berhenti pada bantuan darurat, tetapi berlanjut sampai fasilitas pendidikan benar-benar kembali layak dan aman digunakan," ujar politisi Golkar ini.

Kemendikdasmen juga telah menyalurkan bantuan awal bagi satuan pendidikan dan warga sekolah terdampak gempa di Kabupaten Nagekeo dan Ngada. Bantuan tersebut berupa 9.400

buku nonteks, 495 school kit, 30 family kit, 1.000 kaos dan 1.650 paket makanan. Pemerintah juga menyiapkan dana tunai berbentuk voucher sebesar Rp 860 juta untuk 61 sekolah terdampak.

Dia menilai, bantuan tersebut perlu terus dikawal agar benar-benar menjangkau sekolah, guru, pendik dan peserta didik yang paling membutuhkan. Namun, Pemerintah diminta agar tidak lengah karena kondisi di lapangan masih menghadapi ancaman gempa susulan. "Di masa masih terjadinya gempa susulan ini, kebutuhan primer masyarakat harus tetap menjadi perhatian. Termasuk kebutuhan guru dan anak-anak usia sekolah. Jangan sampai kegiatan belajar mengajar terhenti terlalu lama," katanya.

Pemulihan pendidikan, lanjut dia, harus berjalan paralel dengan penanganan kebutuhan dasar masyarakat. Menurutnya, negara tidak boleh menunggu seluruh kondisi normal untuk mengembalikan hak anak mendapatkan pendidikan. "Yang utama sekarang keselamatan, kebutuhan dasar, dan keberlangsungan pendidikan harus berjalan bersamaan. Anak-anak harus tetap belajar dalam kondisi yang aman, sementara guru dan tenaga

kependidikan juga harus mendapatkan perlindungan," tegasnya.

Rycko menilai, kerusakan fasilitas pendidikan akibat gempa harus menjadi momentum untuk membenahi standar pembangunan sekolah di wilayah rawan bencana. Ia meminta revitalisasi dan pembangunan kembali gedung sekolah di NTT menggunakan konstruksi yang memenuhi standar tahan gempa. Langkah tersebut penting agar sekolah tidak sekadar kembali berdiri, tetapi juga mampu memberikan perlindungan bagi siswa dan tenaga pendidik ketika bencana kembali terjadi.

"Untuk revitalisasi gedung sekolah ke depan diharapkan pembangunannya menggunakan konstruksi standar tahan gempa sehingga bangunan sekolah aman dari gempa," pungkas mantan bupati Lampung Selatan tersebut.

Sebelumnya, Mendikdasmen Abdul Mu'ti memastikan, Pemerintah terus melakukan pendataan terhadap satuan pendidikan terdampak untuk mengetahui tingkat kerusakan. Pendataan tersebut menjadi dasar menentukan kebutuhan yang dapat diakomodasi melalui program Revitalisasi Satuan Pendidikan tahun anggaran 2026. ■ PYB